

ANALISIS HAMBATAN GURU BAHASA INDONESIA SMP NEGERI 10 KAUR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM MERDEKA

Festi Tri Melani¹, Suradi², Dina Putri Juni Astuti³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹ fhestitri3504@gmail.com,

² suradi@iainbengkulu.ac.id, ³ dinaputri@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the obstacles faced by Indonesian language teachers at SMP Negeri 10 Kaur in implementing the Merdeka Curriculum. This research employed a qualitative descriptive approach. The subjects of the study were Indonesian language teachers at SMP Negeri 10 Kaur. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results showed that teachers experienced several obstacles in implementing the Merdeka Curriculum, including limited understanding of curriculum concepts, difficulties in preparing teaching modules, limited learning facilities and infrastructure, varying student characteristics, and limited participation in training activities. These obstacles affect the effectiveness of learning implementation. Therefore, support from schools and related institutions is needed to improve teachers' competence in implementing the Merdeka Curriculum.

Keywords: teacher obstacles, Indonesian language learning, Merdeka Curriculum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 10 Kaur dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 10 Kaur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengalami beberapa hambatan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yaitu keterbatasan pemahaman terhadap konsep Kurikulum Merdeka, kesulitan dalam menyusun modul ajar, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, keberagaman karakteristik siswa, serta terbatasnya kegiatan pelatihan yang diikuti guru. Hambatan-hambatan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pihak sekolah dan instansi terkait untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Kata Kunci: hambatan guru, pembelajaran Bahasa Indonesia, Kurikulum Merdeka

A. Pendahuluan

Kebijakan Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan sebuah respons strategis sekaligus paradigma baru yang dirancang untuk memulihkan krisis pembelajaran (*learning loss*) sekaligus merekonstruksi mutu pendidikan nasional pascapandemi (Kemendikbudristek, 2022). Karakteristik mendasar yang membedakan kurikulum ini dari pendahulunya adalah komitmennya yang kuat pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*), fleksibilitas ruang gerak akademik bagi pendidik, serta integrasi nilai-nilai karakter luhur yang dikristalisasikan dalam Profil Pelajar Pancasila (Rahayu dkk., 2022). Di tengah transformasi struktural ini, guru memegang posisi sentral sebagai garda terdepan sekaligus aktor intelektual utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan internalisasi nilai-nilai kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Bagi seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, tuntutan Kurikulum Merdeka membawa

konsekuensi logis berupa keharusan untuk mereformasi cara mengajar secara fundamental. Pendidik tidak hanya diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran yang adaptif, tetapi juga dituntut mampu memetakan karakteristik, minat, dan gaya belajar peserta didik yang heterogen guna mencapai Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan (Sufyadi dkk., 2021). Kendati demikian, transisi dari Kurikulum 2013 yang cenderung rigid menuju Kurikulum Merdeka yang dinamis sering kali menimbulkan guncangan budaya akademik (*cultural shock*) di kalangan guru. Dinamika perubahan ini di lapangan kenyataannya tidak selalu berjalan linear dan mulus, melainkan kerap kali membentur berbagai dinding penghambat yang bersifat multidimensional, baik yang berakar dari keterbatasan internal kompetensi pedagogis guru itu sendiri maupun kungkungan faktor eksternal kelembagaan sekolah.

Realitas hambatan tersebut tercermin secara nyata berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 10 Kaur. Di sekolah ini, proses implementasi Kurikulum

Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia masih diwarnai oleh beragam kendala substansial yang saling berkelindan. Fenomena yang paling mencolok di lapangan adalah masih rendahnya kedalaman pemahaman konseptual guru mengenai hakikat Kurikulum Merdeka, yang kemudian berimplikasi langsung pada munculnya kesulitan teknis saat mereka harus menyusun Modul Ajar secara mandiri sebagai pengganti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Situasi ini diperparah oleh minimnya intensitas pelatihan dan workshop aplikatif yang menyentuh ranah praktis persekolahan, serta keterbatasan sarana dan prasarana teknologi pendukung di sekolah yang belum memadai untuk menyokong ekosistem merdeka belajar. Di sisi lain, guru juga dihadapkan pada tantangan pelik berupa tingginya disparitas atau keberagaman kemampuan kognitif siswa di dalam satu kelas, yang membuat penerapan pembelajaran berdiferensiasi—sebagai mahkota dari Kurikulum Merdeka—menjadi sangat rumit untuk dioperasionalisasikan dalam rutinitas mengajar sehari-hari.

Berangkat dari kompleksitas persoalan di atas, investigasi ilmiah yang berfokus pada analisis hambatan implementasi Kurikulum Merdeka ini mendesak untuk dilakukan. Penggalian secara empiris dan mendalam mengenai hambatan-hambatan tersebut sangat penting untuk menyingkap tabir realitas di balik ruang kelas yang selama ini mungkin tidak terekam dalam laporan administratif resmi (Makarim, 2023). Hasil dari kajian kualitatif ini diharapkan tidak sekadar menjadi tumpukan dokumen teoretis, melainkan dapat berkontribusi nyata sebagai instrumen evaluasi kritis bagi manajemen SMP Negeri 10 Kaur serta menjadi bahan pertimbangan strategis bagi para pemangku kebijakan pendidikan di tingkat daerah dalam merumuskan skema intervensi penunjang yang tepat sasaran. Melalui pijakan pemikiran ilmiah tersebut, penelitian ini secara spesifik diarahkan dengan tujuan untuk mendeskripsikan, membedah, dan menganalisis secara komprehensif mengenai berbagai hambatan nyata yang dihadapi oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Kaur

dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan terkait hambatan guru Bahasa Indonesia dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 10 Kaur. Subjek penelitian adalah guru Bahasa Indonesia yang mengajar menggunakan Kurikulum Merdeka. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis Kurikulum Merdeka. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada guru untuk memperoleh informasi mengenai hambatan yang dihadapi selama proses implementasi kurikulum. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa modul ajar,

perangkat pembelajaran, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keterbatasan Pemahaman Konseptual Guru terhadap Paradigma Baru

Guru Bahasa Indonesia masih mengalami ambiguitas, kendala kognitif, dan kesulitan substansial dalam memahami struktur dasar Kurikulum Merdeka. Hambatan utama terletak pada ketidakmampuan menerjemahkan secara operasional teks Capaian Pembelajaran (CP) global menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang runtut, serta kebingungan dalam memformulasikan konsep pembelajaran berdiferensiasi di ruang kelas. Kurangnya kedalaman pemahaman konseptual ini secara otomatis menurunkan kualitas perencanaan makro dan eksekusi instruksional di lapangan.

Ketidaksiapan konseptual guru dalam menyerap esensi kurikulum baru cenderung menciptakan efek domino yang menghambat transformasi mutu pendidikan secara menyeluruh (Alimuddin, 2023). Jika aktor utama di kelas belum mumpuni secara filosofis, maka kemerdekaan belajar yang dicita-citakan berisiko terjebak menjadi formalitas administratif belaka (Sanjaya & Pratama, 2024).

2. Kesulitan Teknis dan Beban Administratif Penyusunan Modul Ajar

Proses mendesain Modul Ajar mandiri dirasa sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran (*time-consuming*) bagi guru. Hal ini terjadi karena adanya kewajiban moral untuk menyelaraskan materi ajar dengan karakteristik sosiokultural SMP Negeri 10 Kaur serta kebutuhan riil siswa. Guru merasa terbebani oleh komponen-komponen baru yang sangat asing—seperti pemetaan profil belajar, pembuatan pertanyaan pemantik, hingga penyusunan asesmen diagnostik awal—yang berbeda radikal dari format Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) pada kurikulum sebelumnya. Tuntutan otonomi yang dilepaskan secara mendadak dalam menyusun perangkat merdeka belajar ini sering kali berubah menjadi beban psikologis (*psychological burden*) tersendiri bagi guru yang selama bertahun-tahun telah terbiasa dengan budaya penyeragaman format kaku dari pusat (Sari dkk., 2022).

3. Keterbatasan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Teknologi (TIK)

Berdasarkan data lapangan, pemanfaatan media digital dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia membentur dinding keterbatasan fasilitas fisik sekolah yang sangat minim. Rasio jumlah perangkat komputer atau laptop yang tidak seimbang dengan jumlah siswa, koneksi internet yang fluktuatif, serta keterbatasan proyektor di ruang kelas membuat guru kesulitan menciptakan ekosistem belajar yang interaktif dan berbasis proyek. Padahal, integrasi teknologi informasi merupakan salah satu tiang penyangga utama untuk menyokong efektivitas

kurikulum baru ini. Hambatan infrastruktur fisik di daerah pada akhirnya memicu terjadinya kesenjangan digital pendidikan (*digital educational divide*) yang nyata, memotong kreativitas pendidik, dan memaksa guru kembali menggunakan metode konvensional yang monoton (Wulandari & Wijayanti, 2023).

4. Tingginya Disparitas Karakteristik dan Kompetensi Kognitif Siswa

Guru dihadapkan pada tantangan pelik berupa lebarnya jarak (*gap*) kemampuan literasi dasar, minat, dan kapasitas akademik antar-peserta didik di dalam satu rombongan belajar yang sama. Kondisi heterogen ini menuntut guru untuk memiliki tingkat fleksibilitas dan kompetensi pedagogik yang sangat tinggi agar dapat mengemas strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mampu merangkul gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik secara simultan tanpa ada siswa yang terabaikan. Kegagalan guru dalam memetakan dan merespons heterogenitas kesiapan belajar siswa (*learning readiness*) ini dapat

mengakibatkan stagnasi motivasi, yang pada akhirnya justru memperlebar jurang ketimpangan hasil belajar di dalam kelas itu sendiri (Tomlinson dalam Fauzi, 2022).

5. Minimnya Pelatihan Eksploratif dan Pendampingan Klinis Berkelanjutan

Intervensi peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang diperoleh guru selama ini dinilai masih sangat dangkal, sporadis, dan bersifat searah. Mayoritas guru mengaku hanya mendapatkan sosialisasi singkat yang kaku dan teoretis-birokratis tanpa adanya simulasi klinis yang menyentuh persoalan riil di kelas. Akibatnya, guru terpaksa meraba-raba aturan secara autodidak melalui platform digital tanpa arah yang jelas. Ketidadaan mentor penuntun atau komunitas belajar yang aktif di lingkungan sekolah memicu kerentanan frustrasi profesional di kalangan pendidik. Temuan ini memberikan sinyal urgensi yang kuat akan pentingnya pengadaan program pendampingan yang berkelanjutan (*sustainable mentoring*) dan berbasis kemitraan

demi mendongkrak profesionalisme guru di lapangan (Mulyasa, 2023).

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis data dan pembahasan empiris yang telah diuraikan, dapat disimpulkan secara komprehensif bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Kaur masih dihadapkan pada tantangan multidimensional yang kompleks dan saling berkelindan. Hambatan utama yang dihadapi oleh para pendidik bersumber dari faktor internal kompetensi pedagogis dan faktor eksternal kelembagaan. Di ranah internal, guru mengalami hambatan berupa keterbatasan pemahaman konseptual yang mendalam terhadap struktur paradigma baru kurikulum, yang kemudian berimplikasi langsung pada tingginya tingkat kesulitan teknis dalam mengonstruksi Modul Ajar mandiri yang adaptif. Selain itu, para guru juga harus berjuang keras menghadapi tantangan dalam mengelola ruang kelas yang heterogen akibat tingginya disparitas karakteristik, minat, serta tingkat

kesiapan belajar kognitif siswa dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sementara di ranah eksternal, proses transformasi pembelajaran ini kian terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana penunjang teknologi di sekolah yang belum memadai, serta minimnya frekuensi pelatihan eksploratif dan pendampingan klinis yang diterima guru pasca-sosialisasi kebijakan dari pusat.

Guna meretas benang kusut hambatan tersebut, diperlukan sebuah komitmen kolektif dan intervensi strategis yang sinergis dari pihak manajemen sekolah, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya. Strategi penyelesaian jangka panjang harus difokuskan pada pengadaan program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan (*sustainable mentoring*) yang bersifat praktis-klinis, bukan sekadar sosialisasi birokratis yang searah, agar guru memiliki ruang diskusi adaptif dalam memecahkan masalah riil di kelas (Mulyasa, 2023). Langkah ini wajib diimbangi secara paralel dengan percepatan peningkatan dan pemenuhan sarana infrastruktur pembelajaran digital di sekolah demi

memotong kesenjangan digital yang ada. Hanya melalui integrasi dukungan yang konsisten, penguatan kapasitas kompetensi pendidik, dan penyediaan fasilitas instruksional yang memadai inilah, esensi serta cita-cita luhur dari Kurikulum Merdeka dapat dioperasionalisasikan oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Kaur secara lebih optimal, efektif, dan berdampak nyata bagi mutu belajar peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(2), 112–120.
- Fauzi, A. (2022). Pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(3), 45–53.
- Hadiansah, D., & Sulastri, S. (2022). Problematika implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(4), 1359–1368.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Makarim, N. A. (2023). *Transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319.
- Rusnaini, R., Raharjo, R., Suryaningsih, A., & Noventari, W. (2021). Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan

implikasinya terhadap ketahanan pribadi siswa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 230–249.

Sanjaya, W., & Pratama, D. (2024).

Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 5(1), 67–76.

Sari, D., Putri, N., & Handayani, R.

(2022). Analisis kesulitan guru dalam penyusunan modul ajar Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(2), 98–106.

Sufyadi, S., dkk. (2021). *Panduan*

pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tomlinson, C. A. (2014). *The*

differentiated classroom: Responding to the needs of all learners (2nd ed.). ASCD.

Wulandari, S., & Wijayanti, A. (2023).

Kesenjangan digital dalam implementasi Kurikulum Merdeka di daerah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(1), 78–89.